



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DARU BUANA SEJATI
2. Jabatan : PANITERA MUDA KHUSUS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
3. NHK : 475593

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.040.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/90 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 309 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, Rp. 320.000.000
3. Tanah Seluas 860 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, Rp. 320.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 225.000.000

1. MOBIL, SUZUKI SWIFT FAMILY CAR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOBIL, BMW SEDAN Tahun 1989, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOBIL, BMW E36 Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
4. MOBIL, NISSAN X-TRAIL T31 Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 30.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 30.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.325.000.000

III. HUTANG Rp. 100.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.225.000.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.